

Perppu No. 2/2017 dan Kebebasan Berserikat

Oleh: Gatut Priowidodo, Ph.D

Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa, lahir bukan karena sebab tetapi akibat tindakan organisasi massa yang tidak sejalan dengan ideologi negara Pancasila.

Terang-terangan ormas yang menamakan dirinya Hizbut Tharir Indonesia (Partai Pembebasan Indonesia) menyatakan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah Islam. Undang-undang keormasan yang lama UU No 8 Tahun 1985 yang telah direvisi menjadi UU No 17 Tahun 2013 ternyata kalah pesat dengan perkembangan kekinian. Tidak ada pilihan lain, pemerintah harus mengambil langkah emergensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna mengakomodir keresahan publik yang sudah menjalar kemana-mana tersebut.

Merujuk bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 17 Tahun 2013, terkait asas ormas dan ciri tertentu lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maka apapun jenis ormas jika melawan hal tersebut, hukumnya satu tidak boleh hidup di Indonesia.

Mengelola Keragaman

Indonesia sangat beragam dalam aneka entitas. Tiap-tiap entitas anak bangsa harus dikelola dan dirawat

dalam spirit kebhinnekaan yang saling menghormati. Pikiran-pikiran dominasi memaksa yang mengantar cita-cita keseragaman syariat Islam dalam bentuk negara khilafah, sejak awal harus dieliminasi. Jika ormas sudah bergerak dan terus mengkampanyekan ideologi politik anti Pancasila, itu artinya secara sadar dan terencana mereka akan terus berupaya menambah keanggotaan hingga cita-cita itu terwujud.

Pertanyaan naif, apa salahnya HTI dibubarkan? Secara semantik seolah pemerintah melakukan pendzaliman terhadap ormas ini. Tetapi dibalik itu, tentu pemerintah bersama BIN telah mengumpulkan banyak data terkait sepak terjang ormas ini dalam kurun tiga dekade. Lebih parah lagi sejumlah partai oposan ketika diajak untuk berjibaku melakukan tindakan preventif agar ormas yang berhaluan anti Pancasila ini tidak bertambah besar malah berdalih Perppu yang dikeluarkan dipenuhi pasal karet. Tidak tertutup kemungkinan pemerintah dituduh akan menggunakan Perppu tersebut sebagai instrumen legitimasi praktik tiran dalam memerintah. Terlebih tidak terpenuhinya unsur kepentingan yang memaksa sebagai alasan diterbitkannya Perppu serta ditiadakannya pengadilan sebagai lembaga pembubar ormas



dianggap sebagai bentuk lain dari kesewenang-wenangan.

Spirit negara dibentuk adalah kesepakatan bersama. Itulah sejatinya yang menjiwai mengapa setiap elemen anak bangsa sangat berkepentingan untuk merawat dan memelihara semangat tersebut. Jika perbedaan ekstrim dibiarkan tumbuh atas nama demokrasi tanpa tata kelola yang baik, dapat dipastikan kebaikan bersama yang sudah tercipta tersebut pelan-pelan akan tergerus. Kebebasan berserikat perlu tanggungjawab yang beradab. Tidak hanya kencang menyuarakan kepentingannya tetapi abai terhadap hak-hak pihak lain yang juga memiliki bagian yang sama.

Kebebasan Berserikat

Sebelum abad ketujuh belas, kebebasan politik dipahami secara luas berarti tidak memiliki seorang

master, namun nilai dan kelayakan kebaikan ini diperdebatkan. Hobbes (1588-1679) memperkenalkan konsepsi kebebasan 'negatif' sebagai noninterferensi pada abad ketujuh belas, dan Rousseau (1712-1778) memperkenalkan konsepsi 'positif' tentang kebebasan sebagai penguasaan diri yang efektif pada abad kedelapan belas. Perdebatan antara kedua konsepsi ini telah mendominasi diskusi sejak saat itu dan, mengaburkan pandangan yang lebih tua dan diakui secara luas sebelumnya. (Lovett, F., *History of Freedom*, 2015).

Bila kebebasan dimaknai negatif, maka setiap bentuk perkumpulan atau berserikat akan dicurigai sebagai upaya merongrong kewibawaan negara. Maka jika dibiarkan, kebebasan seperti itu akan menumpulkan kesadaran hak sipil warga semakin kuat. Sebaliknya, jika dimaknai secara positif, kebebasan sebagai hak yang harus dihormati dan taat pada aturan atau hukum yang menjadi kesepakatan untuk menciptakan kebaikan bersama.

Nah di sinilah, kebebasan berserikat ditempatkan sebagai sebuah dilema. Orientasi apa yang dipilih, menunjukkan cara memaknai arti kebebasan tersebut. Jika kebebasan dimaknai sebagai hak individu mengekspresikan kebebasannya

tanpa rambu, jelas itu menciderai makna luhur dari kebebasan itu sendiri. Hakekat kebebasan yang tetap memberi ruang kepada pihak lain berbeda menjadi hilang. Semua diarahkan dalam satu keseragaman yang mendorong munculnya praktik superioritas yang melegitimasi apapun caranya demi sebuah dominasi dan kemenangan.

Cara pandang ini seyogyanya menginspirasi kita dalam membaca terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017. Kebebasan berserikat harus dihormati. Tetapi atas nama kebebasan, jangan pula ada pihak lain yang merasa memiliki kebebasan yang lebih tinggi. Itu sama artinya men-subordinasi kekuasaan negara dalam kepentingan kelompoknya yang sempit. Untuk perilaku seperti ini negara tidak boleh kalah dan tinggal diam. Negara adalah representasi keragaman kelompok dan kepentingan. Ketika satu kelompok keras menonjolkan kepentingannya, satu-satunya pilihan adalah lebih baik dibubarkan demi keutuhan negara yang lebih besar. Pemerintah bijak, negara semakin kuat dan rakyatpun akan berdaulat.

***Gatut Priowidodo, Ph.D**

Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.